

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arifin, Tatang: *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Anton and Warman, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Ali, Zinuddin: *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Djulaeka and Rahayu Devi: *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Hamzah, Adi: *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Insani and Lubis Anggreni: *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Medan: Pustaka Prima, 2022.
- Kelopaking, Anita: *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2013.
- Mertokusumo, Soedikno: *Perundang-Undangan Agraria Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2011.
- Muhaimin: *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mustofa, Muhamad: *Metode Penelitian Kepustakaan*: Get Press Indonesia, 2020.
- Paikah, Nur: *Sosiologi Hukum*, Sulawesi Selatan: Penerbit CV. Cendekiawan Indonesia Timur, 2023.
- Soekanto, Soerjono: *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.
- Soekanto: *Sosiologi Hukum: Penegakan Hukum dan Masalah-Masalah Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Santoso, Urip: *Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Sembiring, Julius: *Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat*, Yogyakarta: STPN Press, 2018.
- Sulistiani, Siska, Lis: *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Utomo, Laksanti: *Hukum Adat*, Depok: Rajawali Press, 2017.
- Yuli: *Buku Ajar Hukum Adat*, Sulawesi: Unimal Press, 2016.

## B. Skripsi dan Jurnal

- Assyifarizi, Alfi, "Analisis Kewenangan Pengelolaan dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah di Pulau Rempang." *Journal of Science Research* 3:5 (2023).
- Ayuningmas, Fitri, Nor, "Reesistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Pulau Rempang Kota Batam, Kepulauan Riau, Terhadap Rencana Pembangunan Rempang Eco City." *Jurnal Inovasi Penelitian* 4:6 (2023)
- Bayo, "Pengakuan masyarakat hukum adat di Indonesia." *Jurnal pembangunan hukum indonesia* 5:1 (2023).
- Basukarna Bagas Adie. "Kepastian Hukum serta Pengakuan Hak atas Tanah Adat terkait Potensi Klaim Sepihak oleh Pemerintah." *Skripsi, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, (2020).
- Fauzan Nabila Annisa, "Konflik sengketa lahan antara masyarakat adat Rempang dengan BP Batam terhadap pembangunan Rempang Eco City." *Jurnal hukum dan HAM wara sains* Vol 02 (2023).
- Fahlevi, Renza, "Dampak sosial dan ekonomi pariwisata dari konflik Rempang," *Jurnal ilmiah ilmu pendidikan* 7:3 (2024).
- Gini Muhamad Ayu, "Status kepemilikan tanah masyarakat Pulau Rempang dalam perspektif kitab al-an wal karya Abu Ubaid Al Asyik bin salam." *Rayah al islam* 8:2 (2024).
- Herawati Tanti, "Perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat Bali di era globalisasi." *Bina mulia Hukum* 12:1 (2023).
- Habiba Aisha Nur, "Aktualisasi hak asasi pada kasus Pulau Rempang di Indonesia dalam perspektif hukum lingkungan," *Jurnal hukum sehasen* 9:2 (2023)
- Izka Zahrotul. "Konflik Agraria dalam Proyek Rempang Eco City." *Sitasi Gemar Menulis*, (2024).
- Ismail Nadhifa Keulang, "Kepastian hukum dan upaya pertanggungjawaban pemerintah terhadap perlindungan hak tanah ulayat di Pulau Rempang." *Jurnal kajian ilmu hukum dan politik* 2:2 (2024).
- Laili Nurul, "Analisa penerapan proyek Rempang Eco City yang mengabaikan hak ulayat dan melukai keadilan masyarakat adat". *Jurnal ilmu hukum* 12:1 (2024).

- Nilamsari Natalia, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif". *Wacana*, (2014).
- Purwanto indra, Assyifarizi Alfi, "Analisis kewenangan pengelolaan dan perlindungan hukum hak atas tanah di pulau rempang". *Journal of science research* 3:5 (2023).
- Rosyadi, Khoirul, "Kewenangan Badan Pengusahaan Batam Pada Pengelolaan Lahan di Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang". *Revista CENIC: Ciencias Biológicas*, (2016).
- Rasyidi A, Mudrma, "Hukum tanah adalah hukum yang sangat penting dibutuhkan oleh masyarakat/bangsa Indonesia di dalam kehidupan sehari hari." *Mitra Manajemen* (2021).
- Shebubakar Arina Novizas, "Hukum Adat/ulayat." *Jurnal magister ilmu hukum* IV:1 (2019)
- Saly Neltje Jeane & Ekalia Ermita, "Status Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Setempat Terkait Relokasi Pulau Rempang". *Jurnal Kewarganegaraan*, (2023).
- Simarmata, Rikardo, "The States Position Regarding Registration of Customary Land". *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, (2021).
- Somantri Rusliwa, Gumilar, "Memahami Metode Kualitatif". *Makara Human Behavior Studies in Asia*, (2005).
- Setyawan, Reggy, "Kekuatan Hukum Status Hak Ulayat Tanah Adat dalam Sistem Hukum Pertahanan di Indonesia." *Skripsi, Iblam School of Law*, 2021.
- Sukmawati Putu Diva, "Hukum agraria dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia." *Jurnal Ilmu hukum Sui Generesis* 2:2 (2022)
- Supit, "Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum." *Lex Administratum* 9:1 (2021)
- Tanuramba Regita Renata, "Legalitas kepemilikan masyarakat adat atas tanah ulayat menurut hukum agraria". *Lex Privatum* VII:5 (2019)
- Triani Emi, Nasution Nabila Fahira, "Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Di Pulau Rempang Dalam Pembangunan Rempang Eco City". *Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, (2023).
- Tanuramba, Reginna, Renata. "Legalitas Kepemilikan Masyarakat Adat atas Tanah

- Ulayat menurut Hukum Agraria." *Lex Privatum*, (2019).
- Tanjung Nadya Salsa, "Struktur sosial dalam masyarakat nelayan di Rempang Kepulauan Riau." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2:11 (2023)
- Tjoneng Arman, Rahman Naugal Afkar, "Kawasan investasi Rempang ditinjau dari hukum positif Indonesia." *Unes Law Review* 6:2 (Desember 2023)
- Tenong, "Pengadaan tanah untuk kepentingan umum." *Jurnal ilmiah dunia hukum* 5:2 (2021)
- Vel Jacqueline & Makambombu Stepanus, "*Strategic Framing of Adat in Land-Acquisition Politics in East Sumba*". *Asia Pacific Journal of Anthropology*, (2019).
- Van der Muur, Willem, "*Forest Conflicts and the Informal Nature of Realizing Indigenous Land Rights in Indonesia*". *Citizenship Studies*, (2018).
- Widiastini, Ni Kadek, Eny. "Efektivitas Hukum Adat dalam Pengelolaan Tanah terkait Investasi Pariwisata di Wilayah Desa Adat Kerobokan." *Jurnal Hukum Mahasiwa*, (2020).
- Widiyanti Puji, "Analisis regulasi hukum dan implikasi terhadap penegakan HAM di Pulau Rempang." *Visi Sosial Humaniora* 4:1 (2023).
- Yudistira Muhammad Alvian & Chaerudin Chaerul, "Perlindungan Hak Tinggal Bagi Masyarakat Pulau Rempang Terhadap Penggusuran Proyek Strategis Negara." *Jurnal Social Logica*, 2023.

### C. Media Online dan Berita

- Adryamarthanino Varelladevanka, "sejarah pulau rempang batam" <https://www.kompas.com/stori/read/2023/09/13/090000679/sejarah-pulau-rempang-batam//> (diakses tanggal 24 Juni 2024)
- Abdurohman, Imanudin, "Dimana Letak Pulau Rempang, seberapa luas, dan milik siapa" <https://tirto.id/profil-pulau-rempang-lokasi-letak-luas-milik-siapa-gP2> (diakses tanggal 17 Desember 2023).
- Haris Mochamad, "Pengertian tanah: konsep dan fungsinya" [gramedia.com/literasi/tanah](https://gramedia.com/literasi/tanah) (diakses tanggal 18 Mei 2024)

Inside, Kutaradja “Keadialan timpang di Pulau Rempang”  
<https://www.scribd.com/document/671987516/> (diakses tanggal 17 Desember 2023).

Maulan, Prima, Yoyok. “Sejarah Kerajaan Riau, penguasa Pulau Rempang pada zaman dulu, <https://intisari.grid.id/read/sejarah-kerajaan-riau-penguasa-pulau-rempang-pada-zaman-dulu/> (diakses tanggal 18 Desember 2023)

Pulau Rempang: the new engine ig indonesia economic growth  
<https://bpbatam.go.id/pulau-rempang-the-new-engine-of-indonesians-economic-growth/> (diakses tanggal 26 juni 2024)

University Binus, “memahami perbedaan analisis kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian ”<https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-perbedaan-analisis-kualitatif-dan-analisiskuantitatif-dalam-penelitian-ilmiah/>(diakses tanggal 12 Desember 2023)

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang syarat-syarat keberadaan masyarakat Hukum Adat.

Pasal 67 Ayat 1 UU Nomor 41 tentang Kehutanan.

Perda Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004.

Keppres Nomor 41 Tahun 1973 tentang Penggunaan Tanah.

Peraturan Menteri Koordinator bidang perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023.

Peraturan 18 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah.

Keputusan Presiden No.28 Tahun 1992

SK Walikota Batam No.105/HK/III/2024

Maklumat Nomor M-4441/LMAR/IX/ 2023 tentang peristiwa masyarakat Melayu Pulau Rempang dan Galang.